

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.

Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiono, Herlien, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan.

Dirdjo, Soerjono Sisworo, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajali, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Peneliatan Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018, *Manual Book Aplikasi Sistem Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON)*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

Kie, Tan Thong, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Lumban Tobing G.H.S., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan, Ignatius Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang.

Siagian, Sondang P, 2007, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, Ghalia Indah, Jakarta.

Sutrisno, 2007, *Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.

Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wironegoro, Rio Kustianto, 2018, *Teknik Pembuatan Akta*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **B. Jurnal/ Karya Ilmiah/ Tesis:**

Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, “Tanggung Jawab Notaris yang tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 (1), Banda Aceh, April 2019.

Cita Astungkoro Sukmawirawan, “Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Warmerking Akta dibawah Tangan Oleh Notaris”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014.

- Fanny Levia, Erni Agustin, “Tanggung Gugat Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10 (1), Malang, April 2017.
- Farokah Syaifuddin, “Tanggung Jawab Notaris atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, 2017.
- Herianto Sinaga, “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Premise Law Jurnal*, Vol.6, 2015.
- Mahalia Nola Pohan, “Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatangananannya dilakukan didalam Rumah Tahanan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Mireille Titisari Miarti Prastuti, “Peran Dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Dibuat Dihadapannya”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006.
- Rachmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 (1), Pekanbaru, 2013.
- Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, “Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris lain”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 2, Juni 2017.
- Shabri Saleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi dan Agama”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1 (1), Juni 2014.
- Yopi Rachmad Affandi Pohan, “ Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017.

### **C. Kamus:**

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta.

#### **D. Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-06.Ah.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung, 27 Januari 2005.

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14.UM.01.01-7715 tentang Pengiriman Laporan Bulanan Secara Online Melalui Aplikasi SIEMON.

#### **E. Internet:**

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham Tingkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Demi Profesionalitas, diakses dari <https://portal.ahu.go.id/id/>, pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 22.21.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Rakor Notaris; Ditjen AHU Suport Grand Launching Aplikasi SIEMON Yogyakarta, diakses dari <https://portal.ahu.go.id/id/>, pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 11.44.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON), diakses dari <http://siemon.kemenkumham.go.id/>, pada tanggal 02 Februari 2020 pukul 10.04.

Latifa Mustafida, 2019, Tata Cara Pelaporan Akta Notaris Setiap Bulannya, <http://www.jogjalaw.com/2019/02/tata-cara-pelaporan-akta-notaris-setiap.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 21.30.

Nur Fatin, 2015, Seputar Pengertian Laporan, <http://seputarpengertian.com/2015/02/seputar-pengertian-laporan.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 20.12.